

newsletter

Tanhana Dharmma Mangrva • edisi 139, Februari 2021



Penyerahan Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Utama Lemhannas RI	2
Pembukaan Orientasi CPNS Lemhannas RI	3
Pengenalan Lembaga Kepada CPNS Lemhannas RI Angkatan 6	4
Pembuatan Kartu Anggota Perpunas RI bagi Peserta PPRA 62	5
Lemhannas RI Menerima Buku pada Acara Peluncuran oleh Yussuf Solichien M.....	5
<i>Entry Meeting</i> Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) Tahun 2020	6
Membumikan Pancasila: Tantangan, Hambatan dan Solusinya.....	7
Webinar Nasional Strategi Penguatan Kebijakan Pengelolaan Sawit	8
Seminar "Kekuatan Partai Politik dan Warna Politik dalam Pilkada Serentak 9 Desember 2021	9
Agus Widjojo Hadiri Webinar, Dalam Rangka Peringatan 76 Tahun Kebangkitan PETA....	10
Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Secara Virtual Bagi Ikatan Alumni ITB Angkatan I Tahun 2021.....	11

Entry Meeting **Pemeriksaan Laporan** **Keuangan Kementerian/ Lembaga (LKKL) Tahun** **2020**

Penyerahan Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Utama Lemhannas RI



Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn.) Agus Widjojo memimpin Acara Penyerahan Tugas dan Tanggung Jawab Komjen Pol Drs. Didid Widjanardi, S.H. sebagai Sekretaris Utama Lemhannas RI yang telah memasuki usia pensiunnya pada Jumat (29/1) di Ruang Nusantara Lemhannas RI.

Dalam kesempatannya, Agus mengatakan bahwa acara tersebut juga menandai saat paripurnanya Komjen Pol Drs. Didid Widjanardi, S.H. menyelesaikan masa bakti dinas aktifnya sebagai Perwira Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kemudian Agus juga menyampaikan bahwa penyerahan tugas dan tanggung

jawab Sekretaris Utama Lemhannas RI bukan sekedar seremonial biasa, namun merupakan simbol penting bahwa jabatan Sekretaris Utama Lemhannas RI memiliki peran vital dalam keberlangsungan suatu organisasi.

"Penyerahan tugas dan tanggung jawab Sekretaris Utama Lemhannas RI ini juga merupakan suatu apresiasi dan kehormatan karena Sekretaris Utama Lemhannas RI telah mengabdikan diri melalui darmabakti selama bertugas di lingkungan Lemhannas RI," sambung Agus.

Namun, mencermati perkembangan nasional dan global berkaitan Covid-19 sebagai pandemi dan bencana nasional, Lemhannas RI mendukung upaya pemerintah dalam penanganan dan

pengecahan penyebaran Covid-19 dengan melakukan upacara tersebut dengan protokol kesehatan yang ketat, di antaranya acara tersebut hanya dihadiri perwakilan jajaran pejabat Lemhannas RI dan Perista Lemhannas RI sehingga dapat dilaksanakan *physical distancing* dan penerapan protokol kesehatan.

Agus menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada Komjen Pol Drs. Didid Widjanardi, S.H., atas dedikasi dan pengabdian yang telah diberikan selama ini. "Kinerja dan prestasi saudara tentu menjadi inspirasi bagi generasi penerus di Lemhannas RI. Selamat memasuki masa purna tugas dan pengabdian di tempat yang baru," tutup Agus.

Pembukaan Orientasi CPNS Lemhannas RI



Kepala Biro Umum Settama Lemhannas RI Brigjen Pol Drs. Sukadji, M.M., memimpin Upacara Pembukaan Orientasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Lemhannas RI Tahun Anggaran 2019, pada Senin (1/2) di Lapangan Tengah Lemhannas RI.

Dalam kesempatan tersebut, Sukadji menyampaikan ucapan selamat datang dan selamat bergabung kepada 42 CPNS Lemhannas RI yang telah dinyatakan lulus seluruh tahapan seleksi.

Menurut Sukadji, seluruh CPNS patut berbangga karena telah mampu melewati serangkaian proses seleksi yang mengedepankan prinsip kompetitif, adil, objektif, transparan dan bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Oleh karena itu, Sukadji berharap seluruh CPNS dapat segera beradaptasi di tempat tugas masing-masing.

"Lemhannas RI merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang memiliki tugas penting dalam

melakukan pendidikan bagi pimpinan tingkat nasional, melakukan pengkajian strategik dan melakukan pemantapan nilai-nilai kebangsaan bagi unsur masyarakat," kata Sukadji menjelaskan tugas Lemhannas RI. Berdasarkan hal tersebut, peran pegawai menjadi sangat penting untuk mendukung tugas dan fungsi Lemhannas RI.

Sukadji juga menjelaskan bahwa personel Lemhannas RI terdiri dari berbagai unsur, baik PNS, Prajurit TNI dan Anggota Polri. "Untuk itu sebagai anggota baru agar saudara segera menyesuaikan diri dan berkolaborasi dengan seluruh pegawai di lingkungan Lemhannas RI," ujar Sukadji.

Meski meyakini bahwa CPNS Lemhannas RI merupakan putra-putri terbaik yang terpilih, namun Sukadji mengingatkan bahwa diterimanya sebagai CPNS belum menjamin bahwa CPNS tersebut diangkat sebagai PNS. Personel CPNS masih harus melalui beberapa tahapan lagi untuk dapat diangkat sebagai PNS.



Untuk itu, sekali lagi saya ingatkan bahwa saudara sekalian harus menunjukkan kinerja optimal dan menjaga kesehatan, sikap dan perilaku di unit kerja nantinya.

Brigjen Pol Drs. Sukadji, M.M.
Kepala Biro Umum Settama Lemhannas RI

"Untuk itu, sekali lagi saya ingatkan bahwa saudara sekalian harus menunjukkan kinerja optimal dan menjaga kesehatan, sikap dan perilaku di unit kerja nantinya," tegas Sukadji.

Pengenalan Lembaga Kepada CPNS Lemhannas RI Angkatan 6



Sebanyak 42 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Lemhannas RI Angkatan 6 menerima materi Pengenalan Lembaga dari Tim Biro Humas Lemhannas RI pada Senin (1/2) di Ruang Syailendra, Gedung Astagatra Lantai 3, Lemhannas RI.

Materi pengenalan lembaga tersebut disampaikan oleh Pranata Humas Ahli Muda Endah Heliana, S.Sos., M.Si. Dalam paparannya, Endah menyampaikan bahwa para *founding fathers* dahulu memikirkan alangkah baiknya kalau Indonesia memiliki sebuah lembaga ketahanan yang mampu memberikan pemahaman mengenai kebangsaan bagi rakyat Indonesia. Lebih lanjut Endah menjelaskan mengenai slogan Lemhannas RI yang diresmikan oleh Presiden RI pertama, Ir. Soekarno pada tanggal 20 Mei 1965. "Sesanti Tanhana Dharmma Mangrva yang berarti tidak ada kebenaran yang mendua," kata Endah.

Endah juga menjelaskan mengenai visi, misi, tugas dan fungsi serta struktur organisasi Lemhannas RI yang sesuai dengan Peraturan Gubernur No. 12 Tahun 2017. Hal tersebut bertujuan agar tumbuhnya rasa kecintaan CPNS Angkatan 6 pada Lemhannas RI. "Semoga kami bisa menumbuhkan rasa kecintaan bapak ibu bagi Lemhannas RI. Dan tentunya harapan besar kami adalah bapak ibu bisa beradaptasi dan bisa membangun Lemhannas RI untuk lebih baik," ujar Endah.

Pada kesempatan yang sama, Salah satu anggota Tim Humas lainnya, Pranata Humas Ahli Muda Cahyaqadri Hildamona Permatasari, S.Si., M.Si menyampaikan bahwa Lemhannas RI juga mengelola media sosial yang tidak hanya untuk menyampaikan kegiatan lembaga, tetapi juga diharapkan dapat menjadi alat penyebaran wawasan kebangsaan. "Media sosial Lemhannas RI sebenarnya tujuannya bukan hanya untuk menyampaikan kegiatan lembaga, tapi juga nanti diharapkan

dapat ikut menjadi salah satu *tools* bagi Lemhannas untuk menyebarkan wawasan kebangsaan," tutur Mona.

Menutup kegiatan tersebut, Pustakawan Ahli Madya Suparmo, S.A.P., M.Si. yang juga merupakan anggota Tim Humas menjelaskan bahwa Lemhannas RI bukan lembaga teknis. Suparmo memberikan contoh bahwa pada fungsi pendidikan, Lemhannas RI mendidik calon kader-kader pimpinan bangsa. Kemudian melalui fungsi pengkajian, Lemhannas menyiapkan kajian yang akan dikirimkan kepada presiden. Melalui fungsi pemantapan nilai-nilai kebangsaan, Lemhannas RI memberikan pemantapan nilai-nilai kepada widyaiswara, dosen, guru, serta tokoh-tokoh masyarakat guna menyiapkan agen-agen dalam rangka menunjang pembangunan. "Sebagai agen nantinya akan meneruskan kepada subagen yang lebih kecil lagi," jelas Suparmo.

Pembuatan Kartu Anggota Perpustakaan RI bagi Peserta PPRA 62



Bagian Perpustakaan Biro Humas Lemhannas RI bekerja sama dengan Layanan Keanggotaan Perpustakaan RI mengadakan pembukaan stan pada Selasa (2/2), di Lobby Auditorium Gajah Mada, Lemhannas RI.

Kegiatan tersebut bertujuan untuk mempermudah peserta PPRA 62 untuk mendapatkan referensi literasi dan sebagai upaya peningkatan layanan kepastakaan. Kerja sama antara Lemhannas RI dan Perpustakaan Nasional RI ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Lemhannas RI dan Perpustakaan Nasional RI yang telah dilaksanakan sebelumnya.

Sebanyak 74 orang yang terdiri dari 59 peserta PPRA 62 dan 15 personel

Lemhannas RI mengikuti pembuatan kartu anggota Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas RI).

Sehari sebelumnya, seluruh peserta PPRA 62 telah diimbau untuk mendaftarkan diri secara daring (daring) sehingga pada saat stan dibuka, seluruh peserta PPRA 62 dapat langsung melanjutkan ke tahap pengambilan foto dan pencetakan kartu anggota.

Sementara, bagi personel Lemhannas RI dan beberapa peserta PPRA 62 yang belum mendaftarkan diri secara daring, dibantu oleh personel Perpustakaan Lemhannas RI sehingga dapat melanjutkan ke tahap pengambilan foto dan pencetakan kartu anggota.

Lemhannas RI Menerima Buku pada Acara Peluncuran oleh Yussuf Solichien M

Kepala Biro Hubungan Masyarakat Lemhannas RI, Brigjen TNI Agus Arif Fadila, mewakili Gubernur Lemhannas RI menerima dua judul buku yang ditulis oleh Mayjen TNI Mar (Purn.) Dr. H. Yussuf Solichien M, M.B.A., Ph.D. dalam acara peluncuran Buku berjudul *Against All Odds, Prajurit Marinir yang Menjadi Panglima Nelayan* dan *Peran Negara dalam Memberantas Illegal Fishing*, pada Rabu (10/2), di Gedung Auditorium Perpustakaan Nasional RI, Jakarta.

Kedua buku tersebut dibagikan kepada beberapa lembaga pendidikan tinggi negeri di Indonesia, diantaranya adalah Lemhannas RI, Sesko TNI, Seskoal, Universitas Indonesia, Universitas Pertahanan, dan Universitas Nasional. Lemhannas RI sendiri menerima sebanyak 22 eksemplar dengan rincian 11 eksemplar pada masing-masing judul. Sebanyak 20 eksemplar akan menjadi koleksi Perpustakaan Lemhannas RI dan dua

lainnya sebagai koleksi Gubernur Lemhannas RI.

Buku Against All Odds, Prajurit Marinir yang Menjadi Panglima Nelayan merupakan autobiografi Mayjen TNI Mar (Purn.) Dr. H. Yussuf Solichien M, M.B.A., Ph.D. yang berisi pengalamannya dalam meniti karir di TNI Angkatan Laut hingga meraih pangkat Mayor Jenderal dan menjadi Ketua Umum Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI). Yussuf berharap autobiografinya dapat mewariskan motivasi kepada pembacanya, terutama kaum muda TNI, POLRI, dan ASN bahwa segala sesuatu dapat tercapai dengan syarat adanya kemauan. "Sejauh kita punya kemauan, tekad, semangat yang kuat, dan berdoa kepada Tuhan, pasti bisa," ucap Yussuf.

Sementara,

buku kedua yang berjudul *Peran Negara dalam Memberantas Illegal Fishing*, merupakan hasil konversi dari disertasi Yussuf saat menyelesaikan studi Strata-3 pada Program Doktorat Ilmu Politik Universitas Indonesia. Buku tersebut menyoroti penyebab masih terjadinya *illegal fishing*, kebijakan negara dalam menghadapi *illegal fishing*, peran pemerintah, dan peran penegak hukum laut, khususnya TNI Angkatan Laut, dalam menangani permasalahan penangkapan ikan secara ilegal di laut Natuna.



Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) Tahun 2020



Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn.) Agus Widjojo menghadiri *Entry Meeting* Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) Tahun 2020 di Lingkungan Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) I Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), pada Kamis (4/2) di Auditorium BPK.

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD, S.H., S.U., M.I.P. yang turut hadir memberikan sambutan dalam *Entry Meeting* tersebut. Menurut Mahfud, ini merupakan wujud nyata komitmen para pimpinan Kementerian/Lembaga serta seluruh pejabat dan undangan yang hadir disini untuk menyelenggarakan administrasi pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

Pada kesempatan tersebut, Mahfud MD juga menyampaikan bahwa saat ini pemerintah berkonsentrasi pada 3 fokus. Pertama, pemerintah

fokus pada penanganan Covid-19 yang sudah menjadi pandemi global. Kedua, pemerintah fokus pada pemulihan ekonomi nasional terutama dengan pemberdayaan ekonomi kecil di tengah-tengah masyarakat. Ketiga, pemerintah fokus untuk menjaga stabilitas sosial masyarakat secara menyeluruh.

Sementara, Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK RI Dr. Hendra Susanto, S.T., M. Eng., M.H., CFRA., CSFA., menjelaskan bahwa BPK RI sebagai salah satu lembaga negara yang dibentuk dan diatur dalam UUD Tahun 1945, bersama dengan lembaga lain memiliki tugas untuk mendorong pencapaian tujuan negara. BPK RI diamanatkan untuk melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang meliputi seluruh unsur elemen keuangan negara termasuk kekayaan negara yang dipisahkan.

Pemeriksaan atas LKKL tahun 2020 pada dasarnya mempunyai tujuan untuk memberikan opini atas laporan keuangan

masing-masing kementerian/lembaga dengan memperhatikan 4 kriteria, yakni kesesuaian penyajian angka-angka dalam laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan informasi dalam catatan atas laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, efektifitas sistem pengendalian internal baik rancangannya maupun implementasinya. Sejalan dengan hal tersebut, lingkup laporan keuangan yang akan diperiksa adalah 5 komponen LKKL tahun 2020 yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan operasional, neraca, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan.

Selain Menko Polhukam dan Gubernur Lemhannas RI, turut hadir dalam *Entry Meeting* tersebut adalah Kepala BNPT, Setjen Wantannas, Kepala BSSN, Kepala Bawaslu, Kepala BNN, Ketua KPK, Kepala BMKG dan sejumlah auditor utama I BPK RI.

Membumikan Pancasila : Tantangan, Hambatan dan Solusinya



Tenaga Profesional Bidang Ideologi dan Strategi Lemhannas RI, Brigjen TNI (Purn.) A. R. Wetik, S.IP.,M.Sc, mewakili Gubernur Lemhannas RI untuk menyampaikan materi dalam Kuliah Ilmu Pancasila dan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan yang diselenggarakan Akademi Ilmu Pancasila pada Rabu (10/2), di Hotel Merlynn Park, Jakarta.

Dalam paparannya, Wetik menyampaikan bahwa Pancasila bukan hanya ideologi bagi rakyat Indonesia, tapi juga budaya, falsafah hidup, juga sebagai cita hukum atau dasar negara yang tertanam dalam jiwa masyarakat Indonesia dan tidak dapat dilepaskan dalam kehidupan berbangsa.

"Hal ini bisa dibuktikan meski Pancasila yang dulu merupakan bagian dari hegemoni kekuasaan Orde Baru masih mampu bertahan meski rezim pemerintahan terus berganti. Berbeda dengan ideologi komunis yang hilang seiring dengan hancurnya Uni Soviet, karena ideologi tersebut bukan merupakan produk asli budaya warganya," jelas Wetik.

Meski begitu, Pancasila tetap harus digaungkan pada generasi penerus bangsa. Hal-hal yang bisa dilakukan adalah dengan terus melakukan berbagai bentuk sosialisasi, diantaranya adalah diajarkan, diteladankan, diatur dan diawasi. "Budaya Pancasila yang digali dari bumi kita, harus kita sosialisasikan untuk dibumikan kembali ke bumi nusantara," kata Wetik.

Pada proses selanjutnya, ungkap Wetik, Pancasila haruslah aplikatif dalam kehidupan sehari-hari. Dengan melekatkan nilai-nilai Pancasila dalam kegiatan sehari-hari, niscaya akan menjadi sebuah kebiasaan yang kemudian menjadi sebuah budaya yang memiliki nilai-nilai Pancasila. Setelah menjadi sebuah budaya, seiring berjalannya waktu nilai-nilai pada Pancasila haruslah melakukan aktualisasi dan penyesuaian terus menerus berdasar pada perubahan zaman.

Wetik juga menyampaikan dengan kondisi masyarakat Indonesia yang heterogen, haruslah memiliki visi yang sama sebagai bangsa, yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Sebagaimana tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Visi ini bisa tercapai bila negara menjalankan fungsinya yang tetap berpegang teguh pada nilai-nilai yang disepakati bersama. Nilai-nilai yang ada pada setiap bangsa Indonesia, yang tidak lain adalah Pancasila dengan berbagai instrumennya. Wetik berharap setiap sosialisasi Pancasila harus bisa diajarkan kepada masyarakat terutama generasi muda secara baik sehingga menjadi prilaku sehari-hari yang membudaya.

Turut hadir dalam Kuliah Ilmu Pancasila dan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan tersebut, Wakil Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Prof. Dr. Hariyono, M.Pd. dan Pengajar Utama Akademi Ilmu Pancasila Brigjen TNI (Purn) Harsanto Adi.

Webinar Nasional Strategi Penguatan Kebijakan Pengelolaan Sawit



Deputi Pengkajian Strategik Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Reni Mayerni, M.P. hadir mewakili Gubernur Lemhannas RI dalam Webinar Nasional Strategi Penguatan Kebijakan Pengelolaan Sawit Secara Berkelanjutan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Dalam Rangka Ketahanan Nasional, pada Rabu (10/2).

Dalam paparannya, Reni yang mengangkat topik "Menjaga Kedaulatan Negara Melalui Optimalisasi Pemanfaatan Kelapa Sawit Sebagai Sumber Energi Terbarukan". Berbicara tentang ketahanan nasional tentu saja itu berasal dari ketahanan-ketahanan astagatra yang salah satunya disana adalah sumber kekayaan alam dan salah satunya adalah tanaman sawit.

Lebih lanjut Reni menyampaikan bahwa ketahanan nasional terkait dengan kondisi dinamis bangsa untuk menanggulangi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan sehingga pendekatannya berasal dari salah satu gatra yang ada, yakni gatra ekonomi. Sejalan dengan gatra tersebut, ada gatra pendekatan spasial geografis yaitu pendekatan provinsi, terlebih sawit berada di beberapa provinsi di Indonesia.

"Satu-satunya yang bisa menjadi pengungkit dan pelopor agrobisnis nasional adalah tanaman sawit," ujar Reni. Menurut Reni, sektor pengembangan industri kelapa sawit sangat strategis bagi pembangunan perkebunan di Indonesia karena mampu menjadi pengungkit dan pelopor pembangunan agrobisnis nasional. Terlebih lagi ada 2 potensi energi yang dapat dihasilkan dari kelapa sawit, yaitu biodiesel dan biopower. "Tentu saja ini akan berkontribusi dalam ketahanan daerah, bahwa ketahanan-ketahanan yang ada di daerah spasial akan menjadi ketahanan nasional," tutur Reni.

Dalam kegiatan tersebut, Reni juga menyampaikan hal yang dipandang perlu guna optimalisasi pemanfaatan kelapa sawit. Reni memandang perlu dibentuknya Badan Orotitas Sawit. Hal tersebut bertujuan untuk menyelesaikan masalah tumpang tindih regulasi dan tumpang tindih baik antarkementerian maupun antara pusat dan daerah untuk mengembangkan industri sawit kedepannya.

Reni juga berharap makin banyaknya kebijakan yang mendorong pengembangan industri pengolah



Mendorong industri pengolahan berskala kecil terbentuknya klaster-klaster dari turunan sawit yang kami sebut *media factory sharing*.

Prof. Dr. Ir. Reni Mayerni, M.P.
Deputi Pengkajian Strategik Lemhannas RI

sawit berskala kecil dan menengah. "Mendorong industri pengolahan berskala kecil terbentuknya klaster-klaster dari turunan sawit yang kami sebut *media factory sharing*," ujar Reni. Hal tersebut dapat dilakukan dengan pola pembinaan, pelatihan, fasilitas (rumah produksi maupun mesin), dan pemasaran produk terhadap petani sawit dapat didukung oleh program kementerian dan lembaga.

Seminar “Kekuatan Partai Politik dan Warna Politik dalam Pilkada Serentak 9 Desember 2020”



Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo menghadiri acara seminar dengan tema “Kekuatan Partai Politik dan Warna Politik dalam Pilkada Serentak 9 Desember 2020” pada Kamis (11/2) di Auditorium Gajah Mada.

Dalam kesempatan tersebut, Agus mengatakan bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi, di mana dalam memilih pemimpin, rakyat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi langsung dalam pemilihan umum baik dalam hal memilih eksekutif dan legislatif di tingkat nasional maupun di tingkat daerah.

Meski berlangsung di tengah pandemi Covid-19, pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara serentak pada 9 Desember 2020 lalu secara keseluruhan berlangsung dengan aman, damai, dan lancar. Ada 270 daerah yang melakukan pemilihan kepala daerah, meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Melihat hasil yang ada, muncul beberapa fenomena menarik, antara lain menguatnya dinasti politik, masih kuatnya praktik politik uang, dan indikasi adanya 21 kasus pelanggaran



Memang perlu ada perbaikan tapi demokrasi tetap harus dirawat. Apalagi belum ada sistem lain yang terbukti lebih baik.

Letjen TNI (Purn.) Agus Widjojo
Gubernur Lemhannas RI

netralitas ASN. Terkait kondisi demokrasi dengan adanya fenomena Pilkada yang mungkin terus terulang, maka perlu dilakukan pengkajian lebih lanjut bagaimana peran kekuatan politik yang ada dalam Pilkada untuk dapat menyukseskan demokrasi di Indonesia.

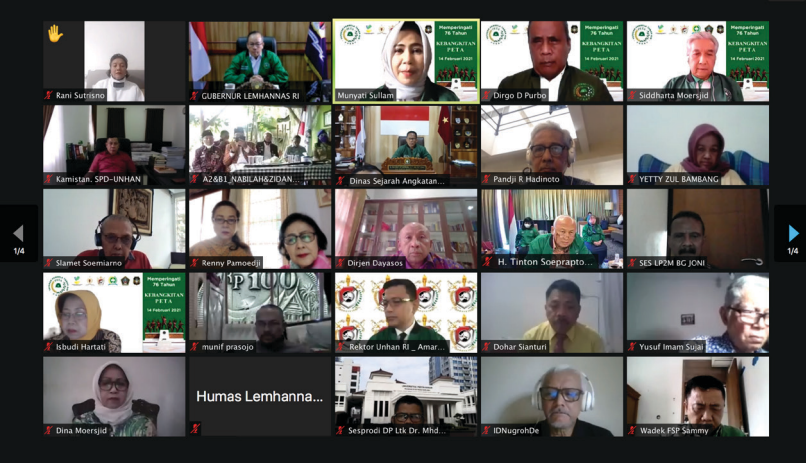
Agus sendiri menekankan pentingnya tetap percaya kepada

proses demokrasi. “Memang perlu ada perbaikan tapi demokrasi tetap harus dirawat. Apalagi belum ada sistem lain yang terbukti lebih baik,” kata Letjen (Purn.) Agus Widjojo.

Seminar yang dimoderatori oleh mantan Redaktur Pelaksana Majalah Tempo Nugroho Dewanto tersebut, bertujuan untuk menganalisis warna politik dan kekuatan partai politik di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota melalui survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas.

Penyaji utama dalam diskusi terbatas tersebut adalah Ignatius Kristanto dan Bambang Setiawan dari Litbang Kompas, serta Arya Fernandes M.Si, Peneliti Departemen Politik dan Perubahan Sosial Center for Strategic and International Studies (CSIS) menjadi pembanding. Adapun pembahas menghadirkan Wakil Pimpinan Redaksi Kompas Tri Agung Kristanto, Wawan Ichwannuddin M.Si dari Pusat Penelitian Politik (P2P) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Dr. Sri Budi Eko Wardani, S.IP, M.Si dari Center for Political Studies Universitas Indonesia (UI), dan Cecilia Sumarlin.

Agus Widjojo Hadiri Webinar, Dalam Rangka Peringatan 76 Tahun Kebangkitan PETA



Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn.) Agus Widjojo menghadiri webinar yang diprakarsai oleh Yayasan Pembela Tanah Air Pusat secara daring pada Minggu (14/2). Menurut Agus, webinar tersebut begitu relevan untuk mengingatkan kepada kita dan sekaligus merefleksikan nilai-nilai patriotik yang terkandung dalam catatan sejarah perjalanan bangsa dalam menghadapi tantangan bangsa saat ini.

Agus mengibaratkan sejarah bagai akar pohon yang menjadi sebatang pohon tumbuh, tegak, dan semakin kokoh. Sejalan dengan hal itu, pertumbuhan dan perjalanan hidup suatu bangsa tak dapat dipisahkan dari sejarah pembentukan yang mengawalinya. "Oleh karenanya, memahami dan memelihara sejarah dalam ingatan kolektif masyarakat menjadi wahana penting untuk menjaga dan merawat kehidupan sebuah bangsa agar terus tumbuh, berkembang dan semakin kuat," tutur Agus.

Kehadiran organisasi Pembela Tanah Air (PETA), tidak dapat dihapus dari catatan sejarah perjalanan perjuangan bangsa Indonesia, terutama dalam perlawanan guna melepaskan

diri dari belenggu penjajahan bangsa asing. Agus juga menyampaikan bahwa secara organisasi, PETA merupakan komunitas perlawanan yang dibentuk oleh pemerintah (penjajah) Jepang sebagai garda perlawanan bersenjata untuk membantu tentara Jepang dalam mempertahankan kepulauan Indonesia yang saat itu masih menjadi tanah jajahan Jepang dari invasi kembali pasukan Sekutu. Kala itu, PETA memiliki semangat patriotik guna mempertahankan tanah air Indonesia agar tidak kembali dijajah oleh bangsa Eropa.

Pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada 19 Agustus 1945, pemerintah Jepang membubarkan organisasi PETA. Hal tersebut disebabkan karena kekalahan pasukan Jepang dari pasukan Sekutu yang juga menandai berakhirnya penjajahan di seluruh wilayah tanah air Indonesia. Sejak saat itu, tidak ada lagi organisasi PETA sebagai organisasi perlawanan menghadapi penjajahan. "Namun demikian, kaum muda yang kala itu pernah tergabung di dalam organisasi PETA, masih tetap memiliki semangat patriotik, cinta bangsa dan tanah air Indonesia," tutur Agus.

Catatan sejarah perjuangan rakyat Indonesia dalam melawan dan mengusir penjajah selama lebih dari tiga setengah abad telah menunjukkan nilai-nilai patriotik yang seharusnya mendapatkan penghargaan dan rasa hormat yang tinggi. Agus mengatakan bahwa nilai-nilai sejarah perjuangan tersebut yang pada hakikatnya menjadi akar untuk tumbuh berkembang dan tegak kokohnya "pohon" kebangsaan Indonesia. Sedangkan, nilai-nilai patriotik yang disarikan dari proses sejarah perjuangan menuju kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia, dapat dijadikan sebagai pembelajaran bagi segenap generasi bangsa ini.

Pada kesempatan tersebut, Agus berharap bahwa peringatan Kebangkitan PETA tidak hanya dihiasi oleh acara-acara protokoler, tetapi juga di dalam kegiatan wacana pertemuan jarak jauh. Hal tersebut penting, menurut Agus, banyak ragam pendekatan-pendekatan dan perspektif-perspektif terhadap sejarah PETA. "Kita harus setia untuk mendengar berbagai perspektif yang berbeda tersebut untuk mengambil pelajaran dan tidak hanya sekedar kita peringati di dalam acara-acara protokoler," ujar Agus.

Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Secara Virtual Bagi Ikatan Alumni ITB Angkatan I Tahun 2021



Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo pada Upacara Pembukaan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Secara Virtual Bagi Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung (ITB) Angkatan I Tahun 2021 Lemhannas RI pada Senin (15/2). Kegiatan yang berlangsung selama sepekan tersebut diikuti oleh 97 orang Alumni ITB.

Dalam sambutannya, Agus menyampaikan bahwa saat ini telah terlihat dengan minimnya pemahaman terhadap nilai-nilai kebangsaan sebagai acuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara telah membuat masyarakat mudah diprovokasi serta dipecah belah oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Oleh karena itu, menurut Agus, pemahaman terhadap nilai-nilai kebangsaan dipandang sangat penting untuk segera dilaksanakan, disosialisasikan, serta dibumikan kembali di tengah-tengah masyarakat, agar semangat bela negara semakin menggelora sekaligus menguatkan persatuan dan menjaga keutuhan bangsa.

Menurut Agus, Alumni ITB yang telah tersebar di berbagai wilayah Indonesia, sebagian telah memiliki posisi jabatan strategis, baik dalam struktur pemerintahan, BUMN, maupun pada sektor swasta. Meskipun telah tergabung dalam suatu Ikatan Alumni ITB, tentunya tetap ada berbagai perbedaan di antara alumninya, seperti perbedaan disiplin ilmu, perbedaan dalam kehidupan bermasyarakat, perbedaan pengalaman, dan perbedaan persepsi serta kualitas pemahaman terhadap nilai-nilai kebangsaan. "Ikatan Alumni ITB merupakan wadah pemersatu dari kaum intelektual, yang merupakan lulusan dari Institut Teknologi Bandung," ujar Agus.

Agus menilai sangat tepat bagi para peserta yang tergabung dalam Ikatan Alumni ITB untuk mengikuti pemantapan nilai-nilai kebangsaan untuk menyamakan persepsi dan meningkatkan pemahaman terkait dengan nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari empat konsensus dasar bangsa, yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI.

"Dengan adanya bekal, persepsi, dan pemahaman yang sama terkait



Pemahaman terhadap nilai-nilai kebangsaan dipandang sangat penting untuk segera dilaksanakan, disosialisasikan, serta dibumikan kembali di tengah-tengah masyarakat.

Letjen TNI (Purn.) Agus Widjojo
Gubernur Lemhannas RI

wawasan dan nilai-nilai kebangsaan ini, diharapkan para peserta mampu memberikan kontribusi yang positif dalam menyelesaikan persoalan bangsa serta senantiasa mengedepankan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau kelompok," tutur Agus.



Tim Redaksi newsletter Lemhannas RI

Penanggung Jawab: **Agus Arif Fadila** Redaktur: **Alton Endarwanto Hadi Susanto**
Penyunting/Editor: **Bambang Iman Aryanto** Pembuat Artikel: **Naomi Augustina**
Penerjemah: **Magista Dian Fitrilia** Desain Grafis: **Arini Maulidia** Fotografer: **Suryadi**
Sekretariat: **Irmina Sri Ekowati, C. Hildamona Permatasari, Mardiana Prihatini,**
Gatot, Yatik Wulandari, Yusnadi

Alamat Redaksi:

Biro Humas Settama Lemhannas RI, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 10, Jakarta Pusat, 10110

Telp. **(021) 3832108, 3832109** Fax. **(021) 3451926**

Website <https://www.lemhannas.go.id>